



Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 3 No. 1 (2026)

<https://jurnalal-ikhlas.com/index.php/PPAI/>

DOI: 10.64677/ppai.v3i1.446

Submit: 10 Mei 2025, Publish: 1 Juni 2026

e-ISSN: 3062-7427

Pendidikan Islam pada penjajahan Belanda: Antara Pembatasan dan Perlawanan

Nur Azizah¹, Salsa Sahlat², Idrus L.³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: azizahnur29april2005@gmail.com¹, Salsaaa2526@gmail.com²,
Idruslatif.ianbone@gmail.com²

*Corresponding Author: azizahnur29april2005@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses Islamic education during the Dutch colonial period by focusing on colonial policies, forms of restrictions imposed on Islamic educational institutions, and the role of Islamic education as a means of resistance among indigenous communities. During the colonial era, education did not merely function as a medium of learning, but was also used by the Dutch government as a political instrument to maintain colonial power and spread Western cultural influence. In this situation, pesantren, surau, and madrasah experienced various forms of pressure through strict supervision, limitations on religious activities, and educational regulations such as the Teacher Ordinance. This research employs a qualitative method with a library research approach by collecting data from books, academic journals, and historical documents related to Islamic education during the Dutch colonial era. The findings show that despite the colonial government's efforts to restrict the development of Islamic education, Islamic educational institutions continued to survive and develop as centers of moral, religious, and social formation within Muslim society. Pesantren functioned not only as institutions for religious learning, but also as centers for fostering patriotism and national awareness. Therefore, Islamic education during the Dutch colonial period played an important role in preserving Muslim identity while simultaneously becoming part of the resistance against colonialism in Indonesia.

Keywords: Islamic Education, Dutch Colonialism, Pesantren, Resistance, Educational Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dengan fokus pada kebijakan kolonial, bentuk pembatasan terhadap lembaga pendidikan Islam, serta peran pendidikan Islam sebagai sarana perlawanan masyarakat pribumi. Pendidikan pada masa kolonial tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran, tetapi juga dijadikan alat politik oleh pemerintah Belanda untuk mempertahankan kekuasaan dan menyebarkan pengaruh budaya Barat. Dalam kondisi tersebut, pesantren, surau, dan madrasah berada dalam tekanan melalui berbagai kebijakan pengawasan, pembatasan aktivitas dakwah, dan regulasi pendidikan seperti Ordonansi Guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kolonial berusaha membatasi perkembangan pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam tetap bertahan dan berkembang sebagai pusat pembinaan moral, keagamaan, dan sosial masyarakat.



Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan semangat perjuangan dan kesadaran nasionalisme. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas umat Islam sekaligus menjadi bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kolonial Belanda, Pesantren, Perlawanan, Politik Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen pembentukan generasi bangsa yang berkualitas dan sebagai sarana transfer nilai. Fungsi pertama berkaitan dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat mampu menghadapi dinamika kehidupan, kompetisi, dan perubahan. Fungsi kedua menunjukkan peran pendidikan dalam mentransformasikan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam pembentukan etika, moral, dan nilai spiritual guna melahirkan masyarakat yang berkepribadian utuh, beradab, demokratis, dan unggul. (Aris, 2022)

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Sejak awal penyebaran Islam, lembaga pendidikan dibutuhkan untuk mencetak para juru dakwah yang mampu menyebarkan ajaran Islam secara luas. Kebutuhan tersebut melahirkan lembaga pendidikan Islam klasik seperti pesantren. (Supriatun, 2023) Perkembangan pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh budaya yang berkembang saat itu. Dalam tradisi Hindu, pendidikan lebih diprioritaskan bagi kalangan kasta Brahmana, Ksatria, dan sebagian kecil Waisya karena sistem kasta membatasi akses pendidikan masyarakat secara umum. (Supriatun, 2023)

Kedatangan bangsa Barat membawa kemajuan teknologi dan sistem pendidikan baru, tetapi tujuan utamanya adalah memperkuat kepentingan kolonial, bukan memajukan masyarakat pribumi. Sistem pendidikan Barat diperkenalkan untuk mencetak tenaga kerja murah yang mendukung kepentingan penjajah. Belanda bahkan menjadikan westernisasi dan kristenisasi sebagai bagian dari kebijakan kolonial mereka di Indonesia selama masa penjajahan. (Supriatun, 2023)

Kemajuan pendidikan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan agama yang diterapkan pemerintah, karena keduanya menentukan arah dan kualitas pendidikan nasional. (Irwan, 2024) Sejak kedatangan VOC ke Indonesia, kolonialisme Belanda tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan politik, tetapi juga membawa misi keagamaan. Pada masa pemerintahan Van Den Boss tahun 1831, sekolah-sekolah gereja diakui sebagai sekolah pemerintah, sementara urusan pendidikan dan agama disatukan dalam satu departemen serta



didirikan sekolah agama Kristen di setiap keresidenan. (Supriatun, 2023) Dalam praktiknya, pemerintah Belanda juga mendukung penyebaran agama Kristen di wilayah jajahan sebagai bagian dari agenda kolonialisme. (Hamzah, 2024)

Pada masa kolonial, sistem pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan pesantren tradisional dan sistem persekolahan Barat yang dibawa Belanda. Hingga awal abad ke-20, pendidikan modern masih kurang diminati masyarakat pribumi karena sebelumnya pendidikan lebih banyak dilakukan secara perseorangan. (Hakiemah, 2021) Sementara itu, Belanda berhasil membangun sistem pendidikan yang merata bagi anak-anak Eropa di Hindia Belanda, termasuk penyediaan sekolah menengah sejak tahun 1860 untuk mempersiapkan mereka memasuki universitas di Eropa maupun menduduki jabatan penting pemerintahan. Kebijakan ini memperlihatkan adanya kesenjangan pendidikan yang sengaja dipertahankan demi menjaga dominasi sosial-politik kolonial. (Sultani and Kristanti, 2020)

Di sisi lain, pendidikan Islam mengalami berbagai tekanan akibat kebijakan kolonial yang restriktif. Namun, diskriminasi tersebut justru mendorong semangat kebangkitan pendidikan Islam di kemudian hari. Kehadiran Belanda di Nusantara yang awalnya berfokus pada perdagangan rempah-rempah tidak hanya bertujuan memperoleh kekayaan (*gold*) dan kejayaan (*glory*), tetapi juga membawa misi penyebaran agama (*gospel*) sebagai bagian dari proyek kolonialisme Barat di Timur. (Irwan et al., 2024)

Pesantren sebagai lembaga sosial dan dakwah memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang berada di lingkungan pesantren umumnya menunjukkan tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi karena adanya pembinaan moral dan keagamaan yang dilakukan secara konsisten oleh para tokoh agama. (Syafe'i, 2017) Memasuki awal abad ke-20, pendidikan Islam di Indonesia mulai menghadapi arus modernisasi Barat yang dibawa pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh tersebut terlihat melalui penerapan sistem pendidikan formal seperti pembelajaran klasikal, pengintegrasian mata pelajaran umum, dan penggunaan kalender akademik modern. Kondisi ini mendorong lembaga pendidikan Islam tradisional untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan Barat yang semakin dominan. (Irwan et al., 2024)

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda berada dalam posisi yang kompleks. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempertahankan ajaran agama, membentuk karakter, dan menjaga identitas umat Islam, tetapi juga dijadikan alat oleh pemerintah kolonial untuk memperkuat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya Barat. Situasi tersebut menempatkan pendidikan Islam di antara tekanan kebijakan kolonial dan perjuangan umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan serta keberlangsungan lembaga pendidikan mereka.



Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan Barat untuk mendukung kepentingan kolonial melalui penyediaan tenaga kerja murah dan pegawai administrasi. Akses pendidikan lebih banyak diberikan kepada kelompok tertentu, sementara pendidikan Islam mengalami berbagai pembatasan karena pesantren dan ulama dianggap dapat memengaruhi masyarakat untuk menolak kolonialisme. Pengawasan dilakukan melalui kebijakan seperti Ordonansi Guru, pembatasan dakwah, dan pengawasan pesantren.

Meski berada di bawah tekanan kolonial, pendidikan Islam tetap berkembang melalui pesantren dan madrasah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menanamkan semangat perjuangan dan mempertahankan identitas umat Islam. Ulama dan kiai berperan penting dalam membangun perlawanan terhadap kolonialisme melalui pendidikan dan pembinaan moral. Dari lembaga pendidikan Islam tersebut lahir tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam, bentuk pembatasannya, serta peran pendidikan Islam sebagai sarana perlawanan umat Islam terhadap kolonialisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*) yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis. Data penelitian dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel sejarah, serta dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bertahap melalui proses pemilahan data, penyusunan informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam pada masa kolonial

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya dan kondisi politik yang berkembang pada masanya. Dalam tradisi Hindu, pendidikan lebih diprioritaskan bagi kalangan kasta Brahmana, Ksatria, dan sebagian kecil Waisya sehingga akses pendidikan masyarakat umum sangat terbatas. (Jauhari, 2017) Memasuki masa Hindia Belanda, pendidikan dijadikan alat politik kolonial untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat pribumi. Kebijakan pendidikan Belanda tidak hanya bertujuan menyebarkan pengetahuan, tetapi juga membatasi pengaruh Islam di tengah masyarakat. (Hasibuan and Hasibuan, 2024)

Di tengah tekanan kolonial tersebut, pesantren tetap bertahan sebagai lembaga pendidikan Islam yang konsisten mengembangkan ajaran Islam sekaligus menanamkan semangat patriotisme dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pesantren juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang tumbuh dari masyarakat sendiri. (Untung, 2013)



Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam terus mengalami perkembangan dari sistem tradisional menuju bentuk yang lebih modern. Masjid pada awalnya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat. Namun, meningkatnya kebutuhan pendidikan mendorong lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih terorganisasi dan sistematis di Indonesia. (Aziz et al., 2024)

Kolonialisme Belanda di Indonesia bermula dari misi perdagangan yang kemudian berkembang menjadi penguasaan politik, ekonomi, dan agama. Melalui konsep 3G (*gold, glory, gospel*), Belanda tidak hanya mengejar kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga menjalankan misi penyebaran agama melalui pendirian sekolah-sekolah Kristen di berbagai pusat pemerintahan kolonial. Pendidikan dijadikan sarana untuk menanamkan pengaruh dan membentuk pola pikir masyarakat pribumi sesuai kepentingan kolonial. (Afima et al., 2025)

Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan Politik Etis sebagai bentuk politik balas budi yang diklaim bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi kolonial. Dalam praktiknya, pendidikan bagi perempuan masih bersifat domestik dengan penekanan pada keterampilan rumah tangga seperti membatik dan menjahit, yang menunjukkan masih kuatnya pandangan konservatif terhadap posisi perempuan pada masa kolonial. (Aziz et al., 2024)

Perkembangan Politik Etis sejak tahun 1901 membawa perubahan penting dalam bidang pendidikan dengan lahirnya kelompok masyarakat terpelajar. Kaum terdidik ini kemudian menjadi bagian penting dalam tumbuhnya kesadaran sosial dan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antara program Politik Etis, bidang pendidikan dianggap paling berpengaruh dalam membuka kesadaran masyarakat terhadap ketimpangan sosial dalam sistem kolonial.

Pemberlakuan kebijakan politik balas budi oleh Belanda memang membawa angin segar bagi perkembangan sekolah-sekolah pribumi di berbagai tingkatan. Namun, potret pendidikan saat itu menunjukkan kesenjangan yang nyata, di mana ruang kelas hanya diisi oleh anak laki-laki. Bagi anak perempuan, rumah adalah satu-satunya madrasah yang mereka miliki karena terikat oleh aturan adat yang ketat. Praktik pingitan menjadi penghalang utama bagi kemajuan kaum perempuan; sebuah tradisi yang mengharuskan gadis muda menghentikan aktivitas di luar rumah sejak usia 12 tahun demi menunggu masa pernikahan. Hal ini menciptakan sekat yang tebal antara kaum perempuan dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih memadai.

Tradisi pingitan umumnya ditemukan dalam struktur sosial masyarakat Jawa, terutama di kalangan keluarga priyayi, sebagaimana yang didokumentasikan dalam studi Stuers. Selama era kolonial Belanda, pendidikan Islam sering kali diidentikkan sebagai "pendidikan bumiputera" karena basis siswanya secara eksklusif terdiri dari penduduk pribumi Nusantara. Secara tipologis, terdapat tiga model utama pendidikan Islam yang berkembang di bawah tekanan penjajahan Belanda, yaitu: sistem transisi dari pola Hindu menuju Islam, sistem pendidikan berbasis surau atau langgar yang lebih sederhana, serta sistem pendidikan pesantren yang lebih terstruktur dan kompleks. (Aziz et al., 2024)



Eksistensi pendidikan Islam pada awal abad ke-20 memiliki keterikatan historis yang sangat kuat dengan periode sebelumnya, sehingga tinjauan terhadap kondisi akhir abad ke-19 menjadi krusial untuk dipahami secara komprehensif. Pesantren, sebagai institusi utama dalam menyebarkan ajaran Islam, sering kali dipandang secara eksentrik oleh para sarjana Barat. Ketertarikan para peneliti kolonial ini muncul karena mereka menemukan perbedaan struktural dan metodologis yang mencolok antara model pendidikan pesantren dengan sistem persekolahan formal yang lazim ditemui di dunia Barat. (Hakiemah et al., 2021)

Dunia pesantren saat ini tidak dapat dilepaskan dari akar sejarahnya pada abad ke-19, di mana lembaga ini berperan ganda sebagai wadah pengajaran agama dan pusat pembinaan mental masyarakat. Fleksibilitas pesantren diuji seiring munculnya perubahan zaman yang menggeser nilai-nilai sosial serta pandangan hidup manusia. Hal inilah yang mendasari terjadinya perubahan struktural dalam dunia pendidikan, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks. (Hakiemah et al., 2021)

Pesantren menempati posisi unik dalam khazanah pendidikan nasional sebagai lembaga Islam tertua yang memiliki akar historis yang sangat kuat. (Syafe'i, 2017) Keberadaannya merupakan kelanjutan dari institusi pendidikan lokal yang sudah berkembang jauh sebelum Islam menyebar di Indonesia. Melalui proses asimilasi yang halus, tradisi lama tersebut diislamkan tanpa menghilangkan esensi kemasyarakatannya. Fenomena ini membuktikan bahwa pesantren adalah hasil sinergi antara peradaban Hindu-Buddha dan Islam, yang dalam perjalanannya terus berevolusi menjadi lembaga pendidikan yang adaptif dan relevan bagi masyarakat dewasa ini. (Fahham, 2020)

Maka dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan Belanda pada masa kolonial merupakan instrumen politik yang bersifat ambivalen, di mana edukasi digunakan sebagai alat kendali kekuasaan sekaligus sarana penyebaran pengaruh Barat dan misi keagamaan melalui semboyan 3G. Meski Politik Etis di awal abad ke-20 mulai membuka pintu bagi kemunculan kaum elit terpelajar yang kelak menjadi motor penggerak kemerdekaan, sistem ini tetap menyisakan ketimpangan yang lebar akibat stratifikasi sosial dan keterbatasan akses bagi kaum perempuan. Diskriminasi yang bersifat domestik bagi perempuan, yang diperparah oleh kuatnya adat pingitan, menunjukkan bahwa modernitas yang ditawarkan Belanda masih terjebak dalam kepentingan kapital dan kontrol sosiologis terhadap masyarakat pribumi.

Di tengah tekanan restriktif tersebut, institusi pendidikan Islam, terutama pesantren, muncul sebagai benteng perlawanan kultural dan basis patriotisme yang paling tangguh. Sebagai hasil akulturasi yang halus antara tradisi lokal Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam, pesantren dan surau berhasil mempertahankan otonomi mereka sebagai pusat pendidikan mental dan spiritual yang mandiri di luar jangkauan birokrasi kolonial. Evolusi pendidikan Islam dari wadah masjid yang sederhana hingga menjadi sistem pesantren yang kompleks membuktikan fleksibilitas umat Islam dalam merespons tantangan zaman. Pada akhirnya, ketegangan antara kebijakan kolonial yang menindas dan ketahanan lembaga



pendidikan tradisional inilah yang membentuk fondasi kesadaran nasional dan tradisi keilmuan Islam yang dinamis di Indonesia hingga saat ini.

b. Bentuk pembatasan terhadap lembaga pendidikan Islam

Kebijakan otoritas kolonial Belanda terhadap populasi mayoritas Muslim di Indonesia sejatinya berpijak pada tiga pilar utama: kecemasan politis, misi religiusitas Kristiani, dan ambisi imperialisme. Meskipun pemerintah kolonial menerapkan pengawasan yang sangat ketat serta upaya sistematis untuk melumpuhkan aktivitas madrasah dan pondok pesantren, prediksi akan runtuhnya pendidikan Islam di Nusantara tidak pernah menjadi kenyataan. Sejarah justru mencatat fenomena yang paradoksal; nilai-nilai Islam tetap terjaga dengan kokoh. Hal ini dimungkinkan karena para ulama dan kiai memilih jalur perlawanan pasif atau *non-cooperative*, dengan menarik diri dari pusat kekuasaan Belanda guna menjaga kemandirian institusi mereka di wilayah-wilayah terpencil. (Amin, 2019)

Gagasan Van Deventer yang diadopsi oleh Ratu Belanda melahirkan era Politik Etis, sebuah upaya yang dianggap sebagai kompensasi moral atas eksploitasi masa lalu. Namun, niat mulia ini berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan, di mana sistem liberal Belanda tetap mengutamakan keuntungan materi di tengah resesi global. Akibat kesejahteraan rakyat Jawa yang kian memburuk, dibentuklah komisi khusus pada Oktober 1902 untuk meninjau pelaksanaan program pendidikan, irigasi, dan migrasi. Meskipun program pendidikan ditawarkan sebagai bagian dari balas budi, penggunaan bahasa Belanda sebagai syarat utama membuat sekolah-sekolah tersebut lebih menyerupai alat penyaring status sosial. Alih-alih memberikan akses luas, pendidikan model Barat ini justru hanya menguntungkan anak-anak pejabat pro-Belanda, yang menandai kuatnya pengaruh kebudayaan Barat dalam sistem instruksi formal di Indonesia kala itu. (Franata et al., 2024)

Pemerintah Belanda menjalankan politik pendidikan secara setengah hati karena tidak menginginkan pribumi memiliki kecakapan intelektual. Pendidikan yang diselenggarakan hanya diarahkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga teknis demi kepentingan kolonial Belanda. Pada masa ini, pesantren juga dicurigai, ditekan, dan diintimidasi. Pembelajaran Islam dipandang sebagai ajaran yang menanamkan rasa benci dan kutukan terhadap kaum kafir. Oleh karena itu, pemerintah Belanda merasa perlu membentuk sekolah dengan sistem pemerintahan untuk mendisiplinkan rakyat. Di Jawa, tekanan pemerintah kolonial Belanda menyebabkan pesantren mengundurkan diri dan menunjukkan perlawanan dengan menjauh dari pusat pemerintahan kolonial. Akibatnya, pesantren berkembang di pelosok-pelosok kampung yang sulit dijangkau. Meskipun pesantren mengasingkan diri dari keramaian, lembaga ini juga mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan memperkuat pelajaran jihad dan latihan fisik. (Firdaus, 2024)

Maka dapat dipahami bahwa Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai bentuk pembatasan terhadap lembaga pendidikan Islam melalui pengawasan yang ketat, tekanan administratif, serta upaya sistematis untuk melemahkan kegiatan madrasah dan pondok pesantren. Kebijakan ini didorong



oleh kekhawatiran politik terhadap mayoritas Muslim, misi penyebaran agama Kristen, dan kepentingan imperialisme. Pendidikan Islam dipandang sebagai kekuatan yang dapat menumbuhkan semangat perlawanan, sehingga pesantren sering dicurigai, diintimidasi, dan dijauhkan dari pusat pemerintahan. Pada saat yang sama, pemerintah Belanda membangun sistem pendidikan formal yang hanya bertujuan mencetak tenaga teknis untuk mendukung kepentingan kolonial, bukan untuk meningkatkan kecerdasan pribumi secara menyeluruh.

Meskipun berbagai pembatasan tersebut diterapkan, lembaga pendidikan Islam tetap bertahan dan terus menjalankan fungsinya. Para ulama dan kiai memilih sikap nonkooperatif dengan memindahkan pesantren ke daerah-daerah terpencil agar terbebas dari pengawasan langsung pemerintah kolonial. Kebijakan Politik Etis yang diklaim sebagai bentuk balas budi juga tidak memberikan akses pendidikan yang merata, karena hanya lebih menguntungkan kalangan tertentu yang dekat dengan pemerintah Belanda. Dalam kondisi tersebut, pesantren tetap menjadi pusat pendidikan, pembinaan agama, dan penguatan semangat perjuangan umat Islam. Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil menghentikan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

c. Pendidikan Islam menjadi sarana perlawanan terhadap kolonialisme Belanda

Di tengah himpitan oleh kolonialisme Belanda, pesantren bertransformasi menjadi poros penting bagi pergerakan sosial sekaligus pusat edukasi rakyat. Peran strategis institusi ini terlihat nyata dalam kebangkitan gerakan nasionalis, seperti Sarekat Islam, yang diinisiasi oleh figur-figur berlatar belakang santri. Dari rahim pesantren pula lahir tokoh-tokoh besar seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahid Hasyim, yang dedikasinya menjadi pilar utama dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun pemerintah kolonial berupaya keras mengintervensi dan membatasi ruang lingkup pendidikannya, pesantren menunjukkan daya tahan yang luar biasa melalui strategi adaptasi. Langkah inovatif diambil dengan mulai mengintegrasikan kurikulum formal yang mencakup sains dan bahasa Belanda, tanpa menanggalkan identitas keislamannya. (Marhamah et al., 2025)

Kolonialisme tidak hanya merusak stabilitas politik dan ekonomi umat Islam, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU sebagai bentuk perlawanan kultural. Penderitaan akibat sistem Tanam Paksa (1830-1870) menjadi bukti nyata kehancuran ekonomi bangsa di bawah kendali asing. Selain itu, upaya Belanda untuk mengendalikan agama terlihat dari pembentukan *Priestrade* pada 1882 dan penerapan Ordonansi Guru yang diskriminatif. Melalui peraturan tahun 1905 dan 1925, Belanda berusaha melakukan birokratisasi terhadap pendidikan Islam dengan mewajibkan adanya izin resmi bagi siapa pun yang ingin mengajar agama, sebuah taktik untuk membatasi ruang gerak dakwah di tengah masyarakat. (Muid et al., n.d.)

Pesantren berdiri teguh melawan kolonialisme Belanda demi menjaga nilai-nilai religi dan budayanya agar tidak tergerus oleh penetrasi pendidikan Barat serta



serangan militer. Semangat patriotisme yang kuat di seluruh tanah air menginspirasi pesantren untuk tidak hanya berdiam diri, melainkan terlibat langsung dalam medan perjuangan. Melalui proses ini, tumbuhlah semangat "protonasionalisme" yang menyatukan visi santri dan kiai dalam melawan penjajahan. Transformasi ini sangat krusial karena berhasil mengubah wajah pesantren dari pusat pembelajaran agama menjadi jantung perlawanan rakyat yang penuh dengan sentimen antikolonial. (Untung, 2013)

Maka dapat dipahami bahwa pendidikan Islam, terutama melalui pesantren dan organisasi seperti Muhammadiyah dan NU, berperan sebagai pusat perlawanan rakyat melawan penjajahan Belanda dengan menjaga ajaran agama sekaligus membangun semangat cinta tanah air. Meski pemerintah Belanda berusaha menekan dan membatasi ruang gerak pendidikan Islam melalui berbagai aturan izin mengajar yang ketat, pesantren tetap bertahan dengan cara beradaptasi, bahkan mulai memasukkan ilmu umum dan bahasa asing ke dalam kurikulumnya. Melalui bimbingan tokoh-tokoh besar dan para kiai, lembaga pendidikan ini berhasil menyatukan visi santri untuk melawan penjajah, sehingga fungsi pesantren berubah dari sekadar tempat belajar agama menjadi jantung perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Belanda pada masa kolonial tidak hanya bertujuan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi, tetapi lebih diarahkan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Pendidikan dijadikan sarana untuk mengontrol pola pikir masyarakat melalui sistem pendidikan Barat yang berorientasi pada kepentingan administrasi, ekonomi, dan penyebaran pengaruh budaya serta agama Barat. Dalam praktiknya, pemerintah kolonial memberikan perhatian lebih besar terhadap sekolah-sekolah yang mendukung kepentingan mereka, sementara pendidikan Islam berada dalam posisi yang diawasi dan dibatasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan Belanda bersifat ambivalen karena di satu sisi membuka akses pendidikan modern, tetapi di sisi lain tetap mempertahankan stratifikasi sosial dan diskriminasi terhadap masyarakat pribumi, khususnya terhadap lembaga pendidikan Islam.

Di tengah dominasi sistem pendidikan kolonial, pesantren tetap mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral, spiritual, dan kesadaran sosial masyarakat Muslim. Sejarah perkembangan pendidikan Islam menunjukkan bahwa lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dan masjid mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Perubahan dari sistem pendidikan tradisional menuju bentuk yang lebih terstruktur menjadi bukti bahwa pendidikan Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi tantangan kolonialisme dan modernisasi Barat. Keberadaan pesantren sebagai hasil akulturasi budaya lokal dan Islam juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki akar historis yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai pembatasan terhadap pendidikan Islam melalui pengawasan ketat, tekanan administratif, serta regulasi



seperti Ordonansi Guru untuk mengendalikan aktivitas ulama dan pesantren. Pendidikan kolonial lebih berorientasi pada kepentingan elit tertentu dan tidak memberikan akses yang merata bagi masyarakat pribumi. Akibatnya, banyak pesantren berkembang di daerah terpencil sebagai bentuk sikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial. Meski berada dalam keterbatasan, pesantren tetap mampu mempertahankan fungsi sosial dan keagamaannya.

Dalam perkembangannya, pendidikan Islam menjadi sarana penting dalam membangun perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan semangat patriotisme dan perjuangan. Para ulama dan kiai menanamkan nilai persatuan, cinta tanah air, dan semangat perjuangan kepada para santri. Dari lingkungan pesantren lahir tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam dan penguatan gerakan sosial masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa kolonial berada di antara tekanan penjajahan dan semangat perlawanan umat Islam. Kebijakan kolonial yang diskriminatif tidak menghentikan perkembangan pendidikan Islam, tetapi justru memperkuat posisi pesantren sebagai benteng moral, budaya, dan keagamaan masyarakat pribumi. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan politik dalam mempertahankan identitas umat Islam serta mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai, identitas, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan kekuasaan kolonial. Sejak awal masuknya Islam di Nusantara, pendidikan telah menjadi bagian penting dalam proses dakwah dan pembentukan kehidupan sosial masyarakat melalui pesantren, surau, dan masjid. Ketika pemerintah kolonial Belanda datang dengan membawa sistem pendidikan Barat, terjadi perubahan besar dalam arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan dijadikan alat politik untuk mendukung kepentingan kolonial, baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, maupun penyebaran pengaruh budaya dan agama Barat. Dalam kondisi tersebut, pendidikan Islam berada dalam posisi yang sulit karena harus menghadapi pengawasan, pembatasan, dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial.

Kebijakan pendidikan Belanda pada masa kolonial memperlihatkan adanya ketimpangan yang cukup jelas antara pendidikan untuk masyarakat Eropa dan pendidikan untuk pribumi. Sekolah-sekolah modern dibangun untuk mendukung kepentingan administrasi kolonial dan lebih banyak memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah Belanda. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam sering dicurigai sebagai pusat lahirnya semangat perlawanan



masyarakat. Berbagai kebijakan seperti Ordonansi Guru, pengawasan terhadap pesantren, pembatasan aktivitas dakwah, hingga kontrol terhadap pengajaran agama menjadi bentuk nyata intervensi kolonial terhadap pendidikan Islam. Politik Etis yang disebut sebagai politik balas budi memang membuka ruang pendidikan yang lebih luas, tetapi dalam praktiknya tetap menyisakan ketidakadilan sosial dan keterbatasan akses bagi sebagian besar masyarakat pribumi, termasuk kaum perempuan.

Meskipun menghadapi berbagai tekanan, pendidikan Islam tetap mampu bertahan dan berkembang melalui kekuatan masyarakat serta peran ulama dan kiai yang menjaga keberlangsungan pesantren secara mandiri. Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga berkembang sebagai pusat pembinaan moral, pembentukan karakter, dan penguatan kesadaran sosial masyarakat Muslim. Kemampuan pesantren dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki fleksibilitas yang kuat tanpa kehilangan identitas dasarnya. Bahkan, dalam situasi kolonial yang penuh pembatasan, pesantren mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pendidikan modern yang mulai masuk melalui pengaruh Barat.

Maka, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda berkembang menjadi bagian penting dalam membangun semangat perlawanan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Pesantren dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang membangun semangat perjuangan melawan kolonialisme. Dari lembaga pendidikan Islam lahir tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa kolonial tidak dapat dipahami hanya sebagai lembaga pengajaran agama semata, melainkan juga sebagai benteng pertahanan moral, budaya, dan sosial masyarakat pribumi dalam menghadapi dominasi kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. 1. Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- Fahham, Achmad Muchaddam. (2020). *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*. Cet. 2. Depok: Publica Institute.
- Afima, Oby Ara dkk. (2025). "Kondisi Pendidikan Islam pada Era Penjajahan Belanda di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 4, Desember 2025.
- Amin, Muh. (2019). "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang." *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 10, No. 2.
- Aziz, Suci Karlina dkk. (2024). "Pengaruh Kebijakan Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No. 5, Oktober 2024.



- rdaus, Aidatun Nisrina Nurul. (2024). "Kebijakan Pemerintah terhadap Pesantren pada Masa Pra Kemerdekaan Indonesia." *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2024.
- Franata, Yudi Agung dkk. (2024). "Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No. 5, Oktober 2024.
- Hakiemah, Ainun dkk. (2021). "Pendidikan Islam di Pesantren: Telaah Pendidikan Islam di Pesantren dari Masa Kolonial-Modern." *Al-Aufu: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Hamzah, Moh. (2024). "Kebijakan Diskriminatif Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam: Studi Kasus Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar." *Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2024.
- Hasibuan, Latifah Rahmi dan Zainal Efendi Hasibuan. (2024). "Kebijakan Politik Hindia Belanda terhadap Pendidikan Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis." *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024.
- Irwan dkk. "Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Kolonial Belanda." *Fitra: Jurnal Studi Pendidikan*.
- Jauhari, Moh. Irmawan. (2017). "Resistensi Pesantren pada Masa Penjajahan Belanda." *Kuttab*, Vol. 1, No. 2, September 2017.
- Marhamah, Aulia dkk. (2025). "Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia." *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin)*, Vol. 3, No. 1, February 2025.
- Muid, Abdul dkk. "Pendidikan Agama Islam pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 13.
- Supriatun. (2023). "Dinamika Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan." *Jurnal Edukatif*, Vol. 1, No. 2.
- Sultani, Zofrano Ibrahimsyah Magribi dan Yasinta Putri Kristanti. (2020). "Perkembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda di Indonesia Abad XIX-XX." *Jurnal Artefak*, Vol. 7, No. 2, September 2020.
- Syafe'i, Imam. (2017). "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Untung, Moh. Slamet. (2013). "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Pesantren." *Forum Tarbiyah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.